



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYA UTAMA
2. Jabatan : SEKRETARIS KEMENTERIAN
3. NHK : 139772

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m²/350 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/217 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m²/205 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 576.000.000

1. MOTOR, VESPA LX-125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV PRESTIGE 1.8 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.424.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.253.742.443**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.482.166.443**III. HUTANG** Rp. 875.726.065**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 8.606.440.378

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.